KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 2 7				H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 68 807 567 0 722 000									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : HADI MAHBUDIANSYAH									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)			JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2			B.3	B.3 B.4 B.5		B.6	B.7		
4 21-402-01			6.728.200	6.728.200	0	15	1.009.230		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022									
Nama Dokume			ımen	en Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9	9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal dd mm yyyyy								
B.10									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK  C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :  C.2 Nama Instansi Pemerintah :		——	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3								7	
C.4	Tanggal	Organisasi :	1 3	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5			•	2 0 2 2 yyyy					
-				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang iik sehingga tidak diperl	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa i	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

70CRK2HJ